



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG**

Nomor SOP	B.1361/BPSPL.1/OT.310/IX/2025
Tgl Pembuatan	22 Oktober 2024
Tgl Revisi	12 September 2025
Tgl Efektif	12 September 2025
Disahkan oleh	Kepala BPSPL Padang  Ditandatangani Secara Elektronik Dr. Rahmat Irfansyah, M.Si NIP. 198212172014031001
Nama SOP	Pengujian Konsekuensi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan5 Peraturan Komisi Informasi Publik nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik6 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik7 Keputusan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik3. Memiliki kompetensi teknologi informasi4. Memiliki kompetensi administrasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik3. SOP Keberatan Informasi4. SOP Permohonan Informasi Publik Online5. SOP Permohonan Informasi Publik Offline	Alat pengolah data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik	Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID BPSPL Padang	Tim Uji Konsekuensi DJPRL	Tim Data dan Informasi DJPRL	PPID DJPRL	Atasan PPID	Sekretariat PPID	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Menghimpun dan mengidentifikasi klasifikasi informasi publik serta menyampaikan hasil identifikasi kepada PPID BPSPL Padang	Mulai							klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	450	klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	
2	Menerima hasil identifikasi klasifikasi informasi publik dan menyampaikan kepada PPID DJPRL								klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	5	Surat klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	
3	Menerima hasil klasifikasi informasi publik dan menugaskan tim uji konsekuensi untuk melakukan uji konsekuensi								Surat klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	5	Disposisi	
4	Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik								Disposisi	1350	informasi hasil uji konsekuensi DIK	
5	Mereviu dan memberikan persetujuan usulan informasi publik								informasi hasil uji konsekuensi DIK	1350	hasil uji konsekuensi DIK/ Surat Tanggapan	
6	Menetapkan usulan informasi publik								hasil uji konsekuensi DIK/ Surat Tanggapan	1350	SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PRL	
7	Memberikan hasil klasifikasi informasi publik kepada PPID Kementerian serta bagian Data dan Informasi PPID DJPRL								SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PRL	5	SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PRL dan Surat Persetujuan	
8	Menerima hasil klasifikasi informasi publik dan menyampaikan kepada PPID UPT								SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PRL dan Surat Persetujuan	5	SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PRL dan Surat Persetujuan	
9	Menerima hasil klasifikasi informasi publik		Berakhir						SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PKRL dan Surat Persetujuan	5	arsip	